

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tanaman Pangan

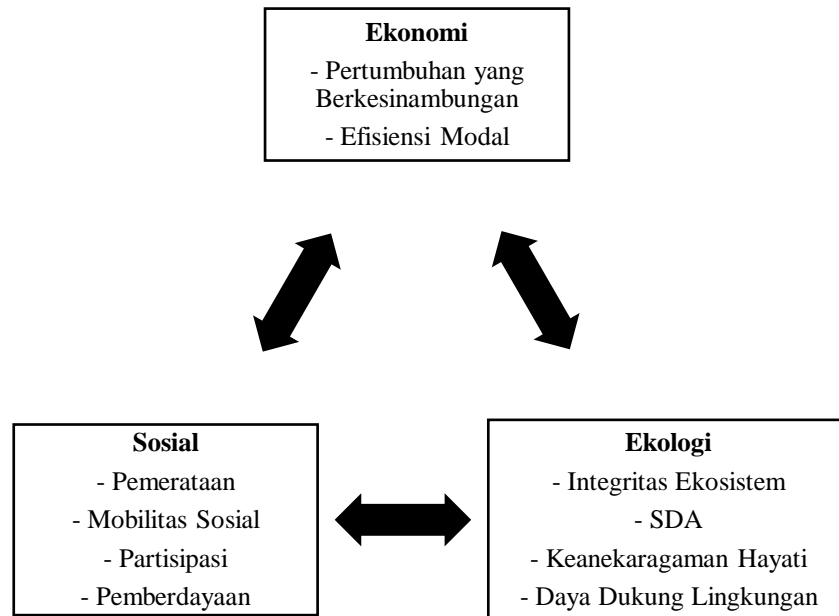
Widodo (2020), menyatakan bahwa tanaman pangan adalah tanaman budi daya (*crops*) yang menghasilkan bahan pangan untuk konsumsi manusia. Dalam pengertian yang lebih spesifik, tanaman pangan adalah sekelompok tanaman semusim penghasil bahan pangan yang dibudidayakan di sawah atau tegalan. Tanaman pangan sebagai sumber karbohidrat dikelompokkan ke dalam tanaman serealia dan tanaman umbi – umbian. Dengan demikian tanaman pangan mencakup berbagai macam jenis tanaman yang secara umum merupakan bagian dari tanaman pangan konvensional dan tanaman hortikultura. Kelompok tanaman pangan konvensional terbagi lagi menjadi tanaman penghasil pangan pokok dan tanaman penghasil bahan pangan alternatif atau pangan sekunder. Pangan pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari – hari sesuai dengan sumber daya dan kearifan lokal. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

2.1.2 Konsep Ketahanan Pangan

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan bisa dicapai melalui perencanaan pangan dengan memperhatikan pertumbuhan dan sebaran penduduk, kebutuhan pangan dan gizi, daya dukung sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, potensi pangan dan budaya lokal, rencana tata ruang wilayah, serta rencana pembangunan daerah. Ketahanan pangan dalam mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan, maka diwujudkan dengan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

2.1.3 Konsep Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Serageldin (1996), menyatakan suatu pembangunan pertanian dan agribisnis bisa dikatakan berkelanjutan jika pembangunan tersebut secara ekonomis, ekologis, dan sosial bersifat berkelanjutan.



Gambar 3. Segitiga Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Ismail Serageldin *Sustainability and the Wealth of Nations* (1996)

Berdasarkan Gambar 3. Pertanian berkelanjutan haruslah berorientasi terhadap tiga dimensi berkelanjutan. Dimensi ekonomi berhubungan dengan usaha ekonomi dimana kegiatan pembangunan harus dapat membuahakan pertumbuhan ekonomi dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Dimensi sosial berhubungan dengan kehidupan sosial manusia yang berhubungan dengan kebutuhan akan kesejahteraan sosial dicerminkan dalam kehidupan yang harmonis. Dimensi ekologis berhubungan dengan keberlanjutan ekologi alam dengan terpeliharanya keragaman hayati dan daya dukung biologis lainnya seperti sumber daya air, tanah, dan agroklimat.

2.1.4 Krisis Pangan

Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022), mengatakan bahwa krisis pangan yang dihadapi dunia saat ini adalah bagian dari masalah global yang dihadapi oleh banyak negara. Krisis pangan mendorong komoditas mengalami

lonjakan harga yang signifikan. Beberapa faktor penyebab terjadinya krisis pangan adalah:

1. Bertambahnya Populasi Manusia

Populasi dunia semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk ini tentunya akan berdampak pada tingkat konsumsi, dan pola konsumsi. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, luas lahan menjadi semakin terbatas, sehingga semakin sedikit lahan subur yang cocok untuk produksi pangan, sementara jumlah orang yang membutuhkan pangan terus bertambah. Jika populasi manusia meningkat sekitar 2 persen setiap tahunnya, maka tentunya kebutuhan konsumsi pangan juga akan meningkat sekitar 2 persen.

2. Hambatan Distribusi Pangan

Penyaluran pangan dari petani atau produsen (area produksi) ke konsumen akhir (area konsumsi) disebut distribusi pangan. Distribusi tidak hanya mencakup distribusi pangan dalam negeri tetapi juga perdagangan internasional dengan sistem harga yang terintegrasi. Saat ini kekurangan pangan sering terjadi baik secara global maupun nasional, karena permasalahan distribusi pangan. Faktor penyebab permasalahan dalam distribusi pangan antara lain prasarana transportasi dan adanya pedagang yang mengontrol distribusi pangan guna mengendalikan harga pangan yang didistribusikan di pasar. Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem distribusi pangan efisien yang bertujuan untuk mendistribusikan pangan secara tepat dan harga terjangkau.

3. Pemanasan Global

Terjadinya pemanasan global (*global warming*) beberapa tahun terakhir ini menjadi bencana besar di muka bumi. Pemanasan global yaitu peningkatan suhu permukaan dan lautan akibat efek emisi gas rumah kaca, menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Di Indonesia sendiri, cuaca ekstrim ini telah menciptakan iklim yang tidak stabil dimana curah hujan tahunan tidak lagi dapat diprediksi. Hal ini dapat mengakibatkan air dalam jumlah berlebihan dan banjir. Banjir yang melanda beberapa wilayah menyebabkan

lahan pertanian terendam. Tentu saja hal ini akan berdampak pada berkurangnya produksi tanaman dan tentu saja pada status gizi negara dan internasional.

4. Konflik Sosial

Perang dengan kegiatan militer sangat berdampak pada sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang dapat bertahan selama berabad – abad. Dampak ini bahkan tidak terbatas pada tanah, sebab diketahui bahwa tanaman dapat menyerap unsur – unsur radioaktif dan logam. Akar dan tunas yang tumbuh di daerah yang terkena dampak perang, meningkatkan potensi unsur – unsur ini akan dicerna oleh manusia, dan hewan. Secara keseluruhan, kegiatan perang merupakan bencana degradasi lingkungan dengan dampak drastis pada pertumbuhan tanaman, produksi makanan, dan peternakan. Selain itu, invasi suatu negara terhadap negara lain mengakibatkan kenaikan harga komoditas, minyak bumi, hasil olahan industri pertambangan, pangan, dan beragam komoditas lainnya.

2.1.5 Konsep Konversi Lahan Pertanian

Hatu (2018), menyatakan kerangka pemikiran konversi lahan pertanian dalam perspektif fungsional – struktural berpijak pada implikasi perubahan nilai – nilai dalam kehidupan masyarakat dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari berbagai kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat pedesaan. Masyarakat pada hakikatnya merespon perubahan tersebut walaupun ternyata respon itu menjadi disolusi struktur dalam menghadapi kehadiran pihak luar, sehingga pada akhirnya hak – hak masyarakat atas lahan menjadi terbatas, kehilangan sumber – sumber ekonomi, dan pergeseran nilai – nilai sosial atau bahkan perkembangan komunitas sosialnya cenderung memudar.

Konversi lahan pertanian dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai contoh yaitu berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan industri, dan fungsi

lindung menjadi lahan pemukiman. Faktor – faktor terjadinya konversi lahan, baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama yang merupakan determinan konversi lahan sawah, yaitu kelangkaan sumberdaya lahan dan air, dinamika pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk.

2.1.6 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 menuliskan, kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencakup sebuah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Kebijakan ini juga mengatur tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dimana telah diatur wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memiliki ruang lingkup atau batasan dalam pelaksanaannya meliputi:

1. Perencanaan dan penetapan yang dijadikan sebagai dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta kegiatan yang menunjang. Perencanaan ini dalam penyusunannya terdiri dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Dasar yang digunakan dalam perencanaan dan penetapan berhubungan dengan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian di lapangan.

2. Pengembangan, dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya berada di bidang agribisnis tanaman pangan. Pengembangan meliputi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
3. Penelitian, dilakukan dalam upaya mendukung perlindungan terhadap LP2B seperti inovasi pertanian, pemetaan zonasi, fungsi agroklimat dan ekosistem, sosial budaya dan kearifan lokal, dan pengembangan panganekaragaman pangan oleh pemerintah dan lembaga penelitian atau perguruan tinggi.
4. Pemanfaatan, dilakukan dengan memperhatikan terhadap kondisi tanah dan air dalam hal penjaminan adanya konservasi air dan tanah yang meliputi perlindungan sumber daya, pelestarian sumber daya, pengelolaan kualitas serta pengendalian pencemaran tanah dan air. Pemanfaatan ini dilakukan oleh setiap orang yang memiliki lahan sawah atau hak atas tanah yang telah ditetapkan ke dalam kebijakan LP2B.
5. Pembinaan, dilakukan dalam perlindungan terhadap lahan LP2B dan pembinaan setiap orang yang terikat dalam pemanfaatan LP2B meliputi koordinasi perlingan, sosialisai peraturan, pemberian supervisi, bimbingan dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penyebarluasan informasi, dan peningkatan kesadaran akan tanggung jawab masyarakat.
6. Pengendalian, dilakukan dalam kebijakan dengan cara melakukan koordinasi antara pemerintah dan menteri yang ditunjuk. Dalam implementasinya dilakukan melalui pemberian insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, serta proteksi.
7. Pengawasan, meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan LP2B. Pelaporan dilakukan secara berjenjang dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat. Laporan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan pelaksanaan di lapangan yang nantinya bisa dijadikan

sebagai acuan dalam menentukan langkah penyelesaian oleh menteri, gubernur dan bupati atau walikota.

8. Sistem informasi, dilakukan dalam menyelenggarakan sumber informasi secara terbuka yang dapat diakses oleh publik. Tujuan dari sistem informasi LP2B untuk mewujudkan penyelenggaraan kebijakan LP2B secara berkelanjutan, terpadu, serta dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari untuk digunakan sebagai acuan kedepannya.
9. Perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melindungi serta memberdayakan beberapa pihak meliputi kelompok tani, koperasi petani, serta asosiasi petani.
10. Pembiayaan, dalam kebijakan LP2B memiliki anggaran dana khusus yang digunakan sebagai sumber pembiayaan segala kegiatan yang berkaitan dengan LP2B. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Pembiayaan ini meliputi kegiatan yang harus dibiayai seperti perencanaan hingga pemberdayaan, sumber dan bentuk pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD, penyelenggaraan pembiayaan yang harus dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban yang diserahkan pada akhir penyelenggaraan suatu kegiatan.
11. Peran serta masyarakat, artinya masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peran disini dapat dilakukan secara perorangan atau berkelompok.

2.1.7 Konsep Persepsi

Branca (1964), menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung pada

saat individu menerima stimulus melalui alat indera yang merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luarnya.

Stimulus yang diterima alat indera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu menyadari, mengerti, tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. Persepsi merupakan proses yang terintegrasi dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya (Moskowitz, 1969).

Walgito (2010), mengemukakan bahwa terdapat tiga komponen yang berperan dalam persepsi sehingga membentuk struktur sikap yaitu:

1. Objek yang dipersepsi menimbulkan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian besar stimulus datang dari luar individu.
2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
3. Perhatian, untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sesuatu.

Setelah individu melakukan interaksi dengan objek – objek yang dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Persepsi positif, merupakan persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.

2. Persepsi negatif, yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang di persepsikan.

Menurut Rani dkk. (2012), menyatakan bahwa ada empat aspek dalam persepsi yang digunakan untuk mengukur persepsi petani antara lain:

1. Ekonomi

Aspek ekonomi pada prinsip ruang lingkupnya dalam persepsi petani dapat dilihat berdasarkan upaya – upaya bagaimana sasaran kebijakan dapat berkembang yang tentunya berpengaruh secara positif terhadap keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari inovasi kebijakan serta implementasinya.

2. Teknis

Aspek teknis pada prinsip ruang lingkupnya dalam persepsi petani dapat dilihat berdasarkan upaya – upaya yang dilakukan untuk pengembangan kebijakan secara teknis dilapangan oleh sasaran kebijakan.

3. Kesesuaian Lahan

Aspek kesesuaian lahan pada prinsip ruang lingkupnya dalam persepsi petani dapat dilihat berdasarkan upaya – upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi organisme terhadap lingkungannya (ekologis) agar dapat mendukung proses produksi pertanian pangan berkelanjutan.

4. Sosial

Aspek sosial pada prinsip ruang lingkupnya dalam persepsi petani dapat dilihat berdasarkan upaya – upaya interaksi sosiologi kultural petani dalam masyarakat dan proses sosial dari kebijakan yang terjadi didalamnya.

2.1.8 Konsep Faktor – Faktor Pembentuk Persepsi Petani

Persepsi pada umumnya ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi sangat ditentukan oleh faktor luar maupun faktor dalam manusianya sendiri. Soekartawi (2000), menyatakan bahwa aspek yang berpengaruh terhadap faktor internal petani meliputi diantaranya:

- 1 Umur dapat didefinisikan sebagai jumlah waktu yang telah dilewati sejak seseorang atau makhluk hidup lainnya dilahirkan, yang dapat dihitung dalam satuan tahun, bulan, hari, atau waktu lainnya. Umur petani merupakan faktor yang sangat berkaitan dengan kemampuan melaksanakan usahatani. Pengaruh umur terhadap kemampuan petani dalam menerapkan teknologi pertanian, bahwa umur memengaruhi kemampuan petani dalam mengambil keputusan terkait penerapan teknologi pertanian atau kegiatan usahatani. Menurut Rusli (1983), bahwa usia produktif berada dalam rentan 15 – 64 tahun. Karena itu penggolongan umur terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu: 1. Usia belum produktif (<15 tahun), 2. Usia produktif (15 – 64 tahun), 3. Usia lansia inproduktif (>64 tahun).
- 2 Pendidikan formal membantu individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai – nilai yang diperlukan untuk menghadapi berbagai situasi dan masalah dalam kehidupan. Pendidikan adalah suatu proses kompleks dan multidimensional yang melibatkan aspek – aspek sosial, psikologis, dan moral. Ditekankan bahwa pendidikan harus mampu membantu individu dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan formal di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu: 1. Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS), 2. Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK/MAK) dan 3. Pendidikan Tinggi (Akademi/Intitusi/Universitas/Sekolah Tinggi).
- 3 Luas lahan merupakan jumlah seluruh tanah yang digunakan petani untuk melakukan usahatani. Petani yang memiliki lahan lebih besar cenderung lebih efisien dalam mengelola lahan pertanian dibandingkan petani dengan lahan yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh kemampuan petani dalam menggunakan mesin pertanian yang lebih besar dan modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih tepat dan efisien, serta manajemen lahan yang lebih baik. Menurut Fadholi (1993) mengemukakan bahwa terdapat tiga

penggolongan luas lahan, yaitu: 1. Lahan sempit (<0,5 hektar), 2. Lahan sedang (0,5 – 2 hektar) dan 3. Lahan luas (>2 hektar).

4. Lama berusahatani atau bisa disebut pengalaman berusahatani. Pengalaman merupakan lamanya waktu yang telah ditempuh oleh petani dalam berusahatani dan dinyatakan dalam tahun. Pengalaman petani dalam berusahatani akan berpengaruh dalam menerima inovasi dari luar. Soeharjo (1999) mengemukakan bahwa pengalaman usahatani atau lamanya berusahatani dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1. Kurang berpengalaman (<5 tahun), 2. Cukup berpengalaman (5 – 10 tahun), 3. Berpengalaman (>10 tahun).

Menurut Listiana dkk. (2013), menyatakan bahwa terdapat aspek lain yang berhubungan dengan karakteristik eksternal petani yang dapat mempengaruhi persepsi antara lain:

1. Sifat Inovasi, beberapa sifat dari inovasi yang berpengaruh terhadap proses adopsi inovasi yang terdiri dari keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian dengan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), tingkat mudah diperagakan (*triability*), dan tingkat kemudahan dilihat hasilnya (*observability*) (Rogers, 2003).
2. Peranan penyuluh dalam prosesnya selaku fasilitator yang tugas utamanya membawa dan menyampaikan ide atau gagasan baru. Selain itu penyuluh juga bertugas untuk mencari alternatif pemecahan masalah, mengorganisasikan dan menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih baik (Romandi, 2021).
3. Peranan kelompok tani merupakan pendekatan kelompok untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani sebagai subjek pembangunan pertanian. Peran kelompok tani dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai wahana belajar, wahana kerja sama, dan unit produksi (Peraturan Menteri Pertanian No.67/Permentan/SM.050/12, 2016).
4. Kosmopolitan merupakan sikap keterbukaan pandangan seseorang yang dapat dilihat dari karakteristik yang mempunyai hubungan dan pandangan yang luas dengan dunia luar maupun kelompok lainnya dan memiliki mobilitas yang

tinggi. Kosmopolitan diukur berdasarkan frekuensi petani dalam mengunjungi atau mengenal lembaga – lembaga baik ditingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Dalam kurun waktu tertentu diukur berdasarkan intensitas kontak petani dalam mengadakan kontak dengan orang diluar kelompok taninya. Serta interaksi petani diukur berdasarkan frekuensi petani dalam pemanfaatan media massa seperti TV, radio, surat kabar, pamflet, majalah, karya publikasi, dan media internet (Mardikanto, 1982).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Alat Analisis	Judul dan Hasil Penelitian
1.	Suharyanto, Jemmy Rinaldi, Nyoman Ngurah Arya dan Ketut Mahaputra (2017)	Analisis Regresi Linier Dengan Metode <i>Ordinary Least Square</i>	Judul: Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Petani Terhadap Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Provinsi Bali. Hasil Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Desa Gubug Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan dan Desa Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Karakteristik usahatani padi sawah di Provinsi Bali yang dicirikan dengan luas lahan yang relatif kecil dan terfragmentasi, dengan aksesibilitas yang baik merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya alih fungsi lahan sawah apabila tidak diikuti penerapan kebijakan PLP2B. Persepsi petani terhadap kebijakan PLP2B beragam karena dipengaruhi oleh: budaya bertani, sikap terhadap perubahan, keyakinan kemampuan diri, tingkat keberanian berisiko, tingkat intelegensia, rasionalitas, kerjasama, peran dalam kelompok tani serta intensitas penyuluhan ataupun sosialisasi terkait perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2.	Budi Purwo Widiarso, Chichika Jeni, Nurdayati (2022).	Analisis Deskriptif, Analisis Interval, Analisis Korelasi <i>Pearson Product Moment</i> , dan Analisis Korelasi Berganda.	Judul: Hubungan Tingkat Kosmopolitan dan Karakteristik Inovasi dengan Sikap Peternak Sapi Potong pada Pengobatan Luka Traumatik Menggunakan Salep Ekstrak Tanaman Yodium. Hasil Penelitian: terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kosmopolitan dengan sikap peternak sapi potong di Desa Mangunrejo sebesar 0,02 ($p < 0,05$), besarnya koefisien korelasi 0,395 dengan kategori korelasi cukup dan cenderung kearah positif. Terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik inovasi dengan sikap peternak sapi potong pada pengobatan luka traumatik menggunakan salep ekstrak tanaman yodium di Desa Mangunrejo sebesar 0,04 ($p < 0,05$), besarnya koefisien 0,355 dengan kategori korelasi cukup dan

			<p>cenderung kearah positif. Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kosmopolitan dan karakteristik inovasi dengan sikap peternak sapi potong pada pengobatan luka traumatik menggunakan salep ekstrak tanaman yodium di Desa Mangunrejo sebesar 0,025 ($p < 0,05$). Besarnya koefisien 0,473 dengan kategori korelasi cukup dan kontribusi R square sebesar 22,4%. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penelitian, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan tingkat kosmopolitan dan karakteristik inovasi dengan sikap peternak sapi potong pada pengobatan luka traumatik menggunakan salep ekstrak tanaman yodium serta adanya penyuluhan kembali mengenai pengobatan luka traumatik menggunakan salep ekstrak tanaman yodium kepada peternak sehingga peternak bias menerapkan inovasi yang diberikan.</p>
3.	Siti Nuraeni, Trisna Insan Noor, dan Dede Sudrajat (2018).	Analisis Deskriptif dan Analisis Skala Likert.	<p>Judul : Analisis Respon Petani Terhadap Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kelurahan Kersanagara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Hasil Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Keranagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Respon petani padi sawah terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) berada direntang positif sebesar 61% yang menunjukkan bahwa petani mendukung dan bersedia mengikuti kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Adapun petani yang bersedia bergabung dalam kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kelurahan Kersanagara memiliki karakteristik seperti pendapatan petani berkategori rendah (248.915-8.415.885), status kepemilikan lahan sebagai pemilik penggarap, berumur produktif dan jumlah tanggungan keluarga rendah.</p>
4.	Rani, Ratnawaty Siata, Idris Sardi (2012).	Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Miles dan Humbermen).	<p>Judul : Persepsi Petani Terhadap Usahatani Kedelai Di Kelurahan Simpang Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.</p> <p>Hasil Penelitian : Persepsi petani terhadap usahatani kedelai dari berbagai aspek (kesesuaian lahan, teknis, ekonomi, sosial) yang telah diteliti memperlihatkan bahwa pada umumnya petani mempersepsikan usahatani kedelai menguntungkan, dengan teknologi dan teknik budidaya yang mudah serta bisa menjadi jaminan bagi masa depannya. Selain itu petani juga mempersepsikan bahwa kawasan tempat petani melakukan usahatani kedelai cocok untuk lahan pengembangan usahatani kedelai.</p>

5.	Indah (2017).	Listiana	Analisis Deskriptif dan Uji Korelasi Rank Spearman.	Judul Penelitian: Kapasitas Petani Dalam Penerapan Teknologi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Padi Sawah Di Kelurahan Situgede Kota Bogor. Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa faktor yang penting diperhatikan untuk meningkatkan kapasitas petani di Kelurahan Situgeda Kota Bogor dalam penerapan teknologi PHT padi sawah adalah: peran penyuluh peran kontak tani dan sifat inovasi. Hubungan antara kapasitas petani dengan penerapan teknologi pengendalian hama terpadu (PHT) pada komoditas padi di Kelurahan Situgede Kota Bogor adalah terdapat hubungan yang signifikan.
----	------------------	----------	---	--

Berdasarkan Tabel 2. Dijelaskan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian – penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian – penelitian terdahulu di antaranya yaitu tujuan dari penelitian untuk mengetahui persepsi petani serta indikator pada variabel persepsi yang digunakan. Selain itu, terdapat persamaan dengan alat analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu serta objek penelitian yaitu kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis dan penelitian terdahulu adalah metode survei.

2.3 Kerangka Pemikiran

Ketersediaan lahan pertanian merupakan syarat yang mutlak bagi tercapainya ketahanan pangan nasional. Adanya kebutuhan yang tinggi akan lahan, sedangkan luas lahan tidak bertambah maka berdampak terhadap fenomena konversi lahan pertanian yang berlangsung secara terus menerus. Dibutuhkannya sebuah upaya untuk melindungi serta mengelola lahan pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal tata letak ruang wilayah (spasial) serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif (sektoral). Ruang lingkup LP2B mencakup pengendalian konversi lahan serta tercapainya pembangunan pertanian berkelanjutan agar terpenuhinya ketahanan pangan di Indonesia.

Penetapan dan pelaksanaan LP2B di Kecamatan Singaparna tidak terlepas dari petani selaku sasaran kebijakan. Hal itu disebabkan kepemilikan lahan yang

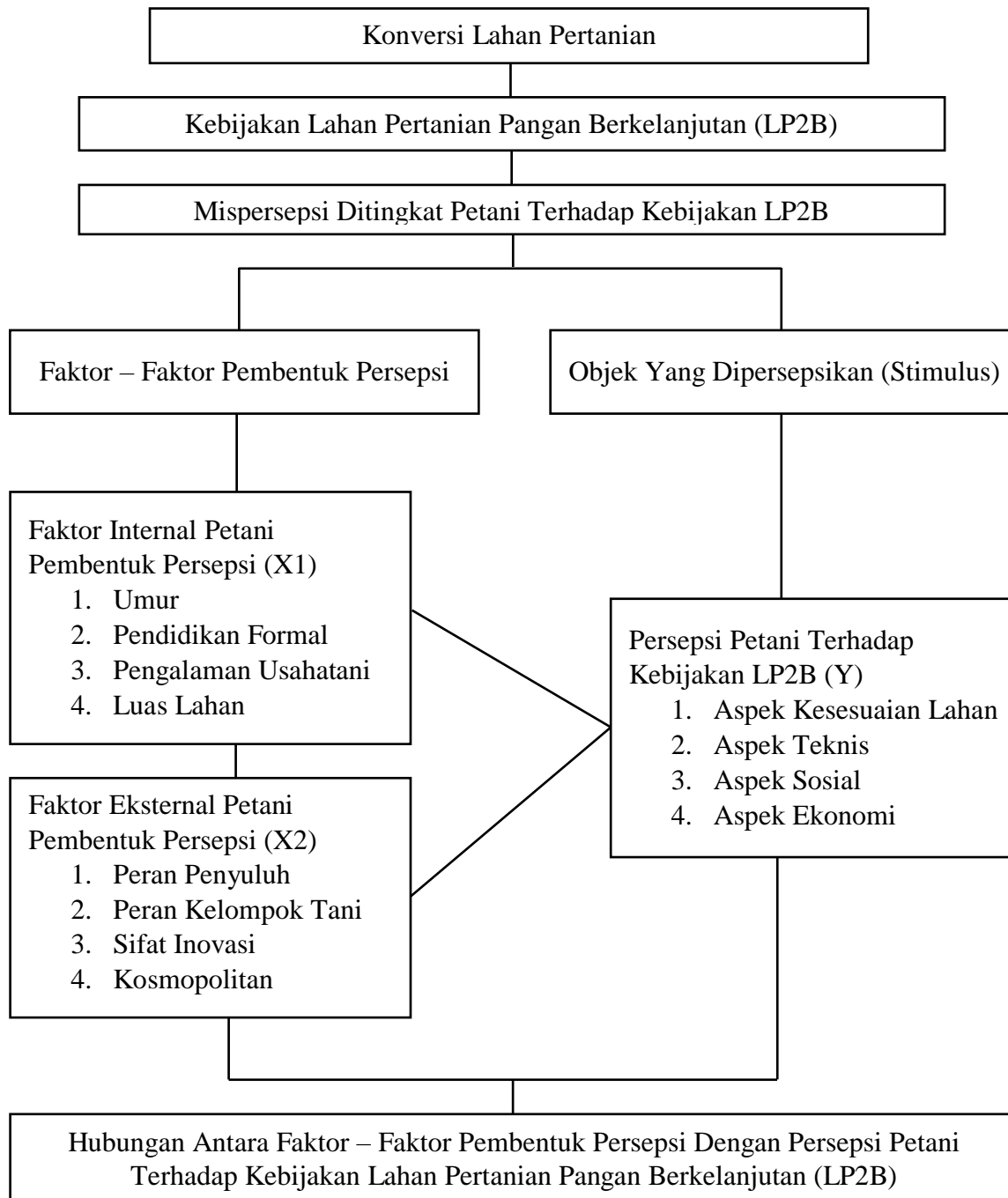
ditetapkan kedalam kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna, merupakan lahan milik pribadi yang sekaligus digarap oleh masyarakat petani. Tetapi didalam implementasinya kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menghadapi sebuah permasalahan yakni terjadinya mispersepsi. Hal tersebut berkenaan dengan petani (objek kebijakan) yang kurang memahami tentang maksud, tujuan, dan gambaran kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Persepsi dapat tumbuh disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal petani dan faktor eksternal petani. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, penentuan variabel faktor internal petani dan variabel faktor eksternal petani yang diteliti dalam penelitian ini mengambil dari faktor – faktor pembentuk persepsi menurut Soekartawi (2000) dan Listiana (2017). Indikator untuk variabel faktor internal petani diantaranya adalah umur, pendidikan formal, pengalaman berusahatani, dan luas lahan. Sedangkan indikator untuk variabel faktor eksternal petani dapat berasal dari peran penyuluh, peran kelompok tani, sifat inovasi, dan kosmopolitan.

Faktor internal petani dan faktor eksternal petani akan membentuk sebuah persepsi, yang kemudian digunakan oleh petani untuk mempersepsikan sebuah objek berupa kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Walgito, 2010). Variabel persepsi petani terhadap Kebijakan LP2B pada penelitian ini, mengambil indikator berupa aspek kesesuaian lahan, aspek teknis, aspek sosial, dan aspek ekonomi yang digunakan untuk mengukur sebuah persepsi petani (Rani, 2012).

Karena berbagai dasar tersebut, penelitian ini akan berfokus pada hubungan secara parsial dan simultan antara faktor internal petani dan faktor eksternal petani dengan persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

Skema kerangka pemikiran secara sistematis dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Bagan Alir Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka untuk tujuan penelitian ke 1 dan ke 2 tidak diturunkan hipotesis karena merupakan hipotesis deskriptif. Sedangkan untuk tujuan penelitian ke 3 diturunkan hipotesis berupa hipotesis asosiatif yaitu:

1. Diduga terdapat hubungan secara parsial antara faktor internal petani dengan persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
2. Diduga terdapat hubungan secara parsial antara faktor eksternal petani dengan persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.
3. Diduga terdapat hubungan secara simultan antara faktor internal petani dan faktor eksternal petani dengan persepsi petani terhadap kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.